

Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) di Kota Semarang

Oleh :

(Nike Triani, Hartuti Purnaweni, Dyah Hariani,)

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedharto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

niketrianifasupa@yahoo.co.id

Abstract

Population growth is moving very fast while not accompanied by increasing sum of jobs will lead to poverty. When poverty struck people, the most visible result is a decrease in the welfare of the child is obtained, in line with the decline their parents welfare. To overcome these problems, through the activities of Deconcentration fund for Rehabilitation and Social Protection, Ministry of Social Affairs through Central Java Social Provincial office, implement toddler social welfare programs in Semarang City (PKSAB) to meet their basic needs. The purpose of this study to determine the implementation PKSAB in Semarang and factors inhibiting and supporting implementation of PKSAB.

Theory used is the evaluation theories of William Dunn, James Anderson, Thomas R Dye, Riant Nugroho and Samudra Wibawa. This study used qualitative methods with 8 people as informants. Data collection techniques were observation and interview, in which the data were processed and analyzed qualitatively.

The result indicate that PKSAB effective accordance with the procedures. The program is managed in accordance with the indicators of program better fulfill meet the toddler need, improve the child in meeting basic needs, improving accessibility to basic social services, strengthening parental responsibility and institutional strengthening. Inhibiting factor program is the responsibility of parents, parents less conscious of the importance of education for toddler, toddler growth monitoring is neglected, and the parents have not been able to meet the toddler basic needs. Recommendations for PKSAB in Semarang is strengthening the Social Workers knowledge on PKSAB, the clarity of the main tasks given to Social Workers, as well as participation of Social Service of Semarang office.

Keywords: Toddler Welfare, Strengthening Parental Responsibility, Indicators of Success Program.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan mengakibatkan kemiskinan. Ketika kemiskinan terjadi, akibat yang paling terlihat adalah menurunnya kesejahteraan anak, sejalan dengan menurunnya kesejahteraan orang tua.

Kemiskinan di Indonesia menjadi faktor utama melonjaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Jumlah anak-anak yang ditelantarkan orang tua semakin meningkat, bahkan anak balita yang ditinggalkan/dibuang oleh orang tua semakin sering didengar di media massa. (Jurnal Berdaya,2011 : 38).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Semarang (2009), jumlah anak balita di Kota Semarang yang berumur 24-59 bulan sebanyak 56.12. Dari keseluruhan jumlah tersebut, tidak semua anak mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Padahal seharusnya anak mendapatkan jaminan dalam mendapatkan kesejahteraan.

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ps 8 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”, dan Ps 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Dalam rangka mengatasi kondisi permasalahan tersebut, melalui Dana Dekonsentrasi pada kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak.

PKSAB selaras dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Pecepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, karena diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang kesejahteraan sosial anak untuk anak balita terlantar, anak jalanan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana PKSAB dilaksanakan di Kota Semarang?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan PKSAB di Kota Semarang dilihat berdasarkan Teori Evaluasi milik Dunn ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengevaluasi PKSAB di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung evaluasi PKSAB di Kota Semarang.

D. KERANGKA TEORI

Menurut Thomas R, Dye (dalam Nugroho 2006:6), Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Soebarsono (2005:119), evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi program sangat diutamakan karena merupakan satu set filosofi dan teknik untuk menentukan jika suatu “program bekerja”.

Samodra Wibawa (1994:8), mengatakan bahwa pemerintah selaku pembuat kebijakan bagaimana pun juga

ingin agar tujuan kebijakan tercapai, sehingga berkepentingan untuk menjaga proses implementasi sebaik mungkin. Seandainya kebijakan tetap gagal mencapai tujuan, pemerintah pasti ingin mengetahui penyebab kegagalan tersebut agar hal yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Untuk kepentingan inilah evaluasi program dilakukan.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kebijakan/program ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik/program yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Indikator Evaluasi yang digunakan untuk menilai program adalah indikator menurut Dunn (Nugroho 2006: 156):

- a. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
- b. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- c. Kriteria pemerataan erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat.
- d. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas berbicara tentang apakah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu.
- e. Kriteria ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan merujuk kepada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

E. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian : Penelitian diskriptif
 2. Situs Penelitian : Kota Semarang
 3. Subjek Penelitian :
 - Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mutiara Kasih di Kota Semarang, selaku penyalur bantuan,
 - Pekerja Sosial (Peksos) yang ditempatkan di Semarang,
 - Orang Tua Penerima Bantuan PKSAB di Kota Semarang.
- E.1 Fenomena Yang Diamati
1. Evaluasi PKSAB di Kota Semarang ditinjau berdasarkan indikator evaluasi milik Dunn meliputi :
 - a. Efektivitas, yang diamati adalah :
 - Efektivitas Pelaksanaan Program

- Usaha Peksos dalam menjalankan Program

- Pengawasan oleh Peksos serta LKSA “Mutiara Kasih”.

b. Kecukupan, yang diamati adalah :

- Kecukupan jumlah penerima bantuan Program

- Kecukupan kebutuhan anak berupa barang-barang untuk anak balita yang disalurkan melalui PKSAB.

c. Pemerataan, yang diamati adalah :

- Adanya pemenuhan kebutuhan pokok anak, yaitu makan, minum, susu..

- Kondisi tempat tinggal yang nyaman, layak huni, dan kondusif bagi semua anggota keluarga (ada fasilitas listrik dan kamar mandi).

d. Responsivitas, yang diamati adalah:

- Respon/ kepuasan penerima bantuan PKSAB ,

- Respon Peksos terhadap PKSAB,

- Respon LKSA “Mutiara Kasih” terhadap PKSAB,

e. Ketepatan, yang diamati adalah :

- Penerima bantuan PKSAB adalah benar-benar anak miskin dari keluarga yang miskin pula,

- Ketaatan penerima bantuan terhadap ketentuan penerimaan dana yang disalurkan langsung dari Kemensos ke rekening anak penerima bantuan PKSAB.

2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan PKSAB di Kota Semarang, dilihat dari komponen program:

a. Bantuan Sosial/Subsidi Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

b Peningkatan Aksesibilitas terhadap Pelayanan Sosial Dasar,

c. Penguatan Tanggung Jawab Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat,

d. Penguatan Kelembagaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

E.2 Jenis Data

a. Data Primer : Wawancara

b. Data Sekunder : Data dari Peksos, LKSA “Mutiara Kasih”, serta Orang Tua penerima bantuan PKSAB

E.3 Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara

E.4 Analisis dan Intepretasi Data : Pencatatan, Pengklasifikasian, Verifikasi

F. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

F.1 EVALUASI PKSAB DI KOTA SEMARANG

a. Efektivitas

1) Efektivitas Pelaksanaan Program

Dari data yang didapatkan di lapangan, disimpulkan bahwa PKSAB telah berjalan sesuai dengan prosedur dan efektif, sesuai dengan indikator keberhasilan program. yaitu tercukupinya kebutuhan dasar anak, yaitu: pendidikan, kesehatan, serta mendapatkan gizi yang sesuai dengan umur dan mendukung tumbuh kembang anak.

2) Usaha Peksos untuk menjalankan PKSAB

Usaha Peksos untuk menjalankan PKSAB dinilai sangat penting, karena Peksos yang turun langsung ke lapangan serta mengerti kondisi lapangan secara langsung. Banyak kendala yang dihadapi Peksos selama menjalankan program, yaitu anak penerima manfaat tidak berada di rumah. Anak dititipkan di rumah nenek dan orang tua mereka bekerja, sehingga pemantauan sulit dilakukan. Lalu dari segi nutrisi adalah adanya anak yang susah makan, kurang asupan giizi.

3) Pengawasan oleh Peksos serta LKSA

Untuk pemenuhan akuntabilitas dan pelaksanaan pengendalian kualitas

penyelenggaraan PKSAB, dilakukannya koordinasi antara Peksos dengan LKSA dalam pengawasan PKSAB. Bentuk kegiatan pengawasan ada pada tiap kegiatan PKSAB. Masalah yang timbul adalah lemahnya koordinasi antara Peksos dengan LKSA selama PKSAB berlangsung.

b. Kecukupan

1) Kecukupan jumlah penerima bantuan PKSAB di Kota Semarang

Jumlah penerima bantuan PKSAB di Kota Semarang sebanyak 70 anak, tersebar di Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Kuningan, Kecamatan Palebon, dan Kecamatan Genuk. Penerima bantuan paling banyak terdapat di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Genuk sebanyak 20 anak, sedangkan penerima bantuan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Peleburan. Anak-anak penerima bantuan memang layak mendapatkan bantuan, karena mereka yang berasal dari keluarga miskin dan sangat miskin.

2) Kecukupan kebutuhan anak berupa barang-barang untuk anak balita yang disalurkan PKSAB

Kebutuhan anak terutama anak balita memang sangat kompleks. Manfaat yang dapat ditunjukkan bahwa program dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik dan mampu mencukupi kebutuhan anak. Barang tersebut berupa susu, perlengkapan mandi, penunjang perkembangan anak, barang-barang primer seperti beras, telur, minyak dll.

c. Pemerataan

1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Anak Penerima Bantuan PKSAB

Secara keseluruhan orang tua anak penerima bantuan mendukung adanya PKSAB. Besar harapan mereka dengan adanya program ini dapat membantu orang tua dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, akte kelahiran dll) untuk anak-anaknya

2) Kondisi Tempat Tinggal yang Nyaman dan Layak Huni, Kondusif bagi Anak dan Keluarga Penerima Bantuan PKSAB.

Kondisi fisik tempat tinggal penerima bantuan PKSAB benar-benar tidak layak huni. Hal ini membuktikan bahwa pemerataan penerima bantuan tepat sasaran dan sesuai kriteria.

Tidak hanya fasilitas yang tidak memadai, akan tetapi lingkungan tempat tinggal yang kumuh dan mayoritas selalu terkena banjir, terutama di Kecamatan Genuk dan Kuningan, membuat kondisi anak memprihatinkan. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni dipastikan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

d. Responsivitas

1) Respon/ kepuasan penerima bantuan terhadap PKSAB

Respon dari penerima bantuan dilihat dari orang tua penerima bantuan, karena penerima bantuan yang masih berusia di bawah lima tahun (balita) sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKSAB mendapatkan respon yang positif dan sangat bermanfaat .

2) Respon Peksos terhadap PKSAB

Peksos memiliki peranan penting dalam proses pelaksanaan PKSAB. Peksos mengetahui langsung kondisi lapangan serta harus mampu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Peksos merespon dengan baik adanya program ini. Kendala yang berada di lapangan dapat diketemukan solusi dalam memecahkan permasalahan. Hanya koordinasi dengan LKSA yang sedikit menghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peksos menganggap LKSA tidak menguasai program.

3) Respon LKSA “Mutiara Kasih” terhadap PKSAB

Kepala LKSA “Mutiara Kasih” menunjukkan bahwa PKSAB sangat didukung oleh Lembaga. Tidak jauh berbeda dengan Peksos, permasalahan ditemukan di lapangan adalah lemahnya koordinasi antara LKSA dengan Peksos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA menganggap Peksos tidak mampu bekerja dengan baik.

e. Ketepatan

1) Penerima Bantuan PKSAB adalah anak miskin dari keluarga miskin pula

Sasaran PKSAB diprioritaskan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, eksploitasi dan diskriminasi. Penerima bantuan PKSAB di Kota Semarang adalah benar anak dari keluarga sangat miskin dan miskin, yang tersebar di Kecamatan Banyumanik, Peleburan, Palebon, Kuningan, serta Genuk.

2) Ketaatan penerima bantuan terhadap ketentuan penerimaan dana yang disalurkan langsung ke rekening anak penerima bantuan PKSAB

Perolehan dana dari PKSAB adalah sebesar Rp 1.500.000,00 dalam satu tahun yang berjalan selama 10 (sepuluh) bulan, atau sebesar Rp 150.000,00 setiap bulan. Dana yang didapatkan lalu dikelola oleh Peksos berkoordinasi dengan LKSA dalam membelanjakan kebutuhan anak dimana setiap bulannya didata terlebih dahulu barang apa yang dibutuhkan anak, kemudian dana dibelanjakan keperluan dasar untuk anak, seperti susu, vitamin, perlengkapan mandi anak, dll.

F.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PKSAB DI KOTA SEMARANG

a. Bantuan Sosial/Subsidi Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam PKSAB telah dilaksanakan dengan baik oleh LKSA Mutiara Kasih, yang berkoordinasi dengan Peksos. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan prosedur serta pedoman yang ada, yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti susu, kebutuhan primer 4 sehat 5 sempurna, pemantauan gizi anak, dan kesehatan anak terjamin.

b. Peningkatan Aksesibilitas Terhadap

Pelayanan Sosial merupakan dasar langkah utama dalam penyelesaian masalah anak yang belum terpenuhinya aksesibilitas atau belum memiliki akte, dipenuhi dengan telah dibuatkannya akte kepada anak-anak yang belum mempunyai akte.

c. Penguatan Tanggung Jawab Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat

Secara keseluruhan proses penguatan orang tua/keluarga dan masyarakat masih dilakukan oleh berbagai pihak seperti ketua LKSA, Peksos, pendamping lapangan serta orang-orang yang peduli dengan keadaan anak. PKSAB memberikan dampak penguatan orang tua/keluarga dan masyarakat kepada orang tua, dengan sosialisasi serta pertemuan wajib orang tua penerima bantuan setiap bulan. Membantu orang tua untuk dapat memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, pendidikan, serta tumbuh kembang anak. Hal ini dilakukan karena banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya pendidikan anak, kesehatan serta pengamatan terhadap tumbuh kembang anak

d. Penguatan Kelembagaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan penguatan kelembagaan dalam hal pengembangan kelembagaan adalah:

- Pendataan lembaga pelayanan sosial anak (TPA/KB/TBS)
- Melaporkan dan berkordinasi dengan Dinas Sosial setempat untuk inventarisir SDM, manajemen, sarana dan prasarana lembaga
- Klasifikasi lembaga pelayanan
- Pembinaan manajemen kelembagaan

G. KESIMPULAN

G.1 PKSAB

a. Efektifitas

1. Efektifitas Pelaksanaan Program

PKSAB dapat dikategorikan sebagai program yang meningkatkan kesejahteraan anak dan terlaksana dengan efektif.

2. Usaha Peksos untuk menjalankan PKSAB

Peksos mengawasi dan memberikan pendampingan dalam melaksanakan program. Kendala yang dihadapi Peksos adalah LKSA kurang menguasai program sehingga menghambat pelaksanaan program.

3. Pengawasan oleh Peksos serta LKSA.

Pengawasan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu Peksos dan LKSA, untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan komponen program.

b. Kecukupan

1. Kecukupan jumlah penerima bantuan PKSAB

Sebanyak 70 anak penerima bantuan di Kota Semarang, yang tersebar di Kecamatan Banyumanik, Kuningan, Genuk, Palebon, Pleburan. Penerima bantuan telah diseleksi berdasarkan kriteria penerima bantuan maka PKSAB cukup tepat disalurkan kepada mereka yang jauh dari sejahtera.

2. Kecukupan kebutuhan anak berupa barang-barang untuk anak balita yang disalurkan PKSAB

Kebutuhan anak yang mampu terpenuhi dari PKSAB adalah berupa barang-barang primer, seperti susu, beras, telur, peralatan mandi, Peksos serta LKSA selalu mengarahkan orang tua agar membelanjakan dana untuk keperluan Primer anak.

c. Pemerataan

1. Pemenuhan kebutuhan pokok anak penerima bantuan PKSAB. Manfaat

- yang didapatkan anak merata dalam hal pemenuhan kebutuhan anak, pendidikan, gizi serta perkembangan anak yang meningkat setelah mendapatkan bantuan.
2. Kondisi tempat tinggal yang nyaman, layak huni serta kondusif bagi anak dan keluarga penerima bantuan PKSAB. Kondisi tempat tinggal yang dihuni anak penerima bantuan sesuai dengan kriteria, yaitu sangat tidak layak huni. Di wilayah Genuk serta Kuningan, kondisi anak penerima bantuan sangat tidak layak karena lingkungan tempat mereka tinggal selalu terkena banjir dan rob.
- d. Responsivitas
1. Respon/kepuasan penerima bantuan PKSAB. Respon dari orang tua penerima bantuan adalah PKSAB dianggap sangat positif, karena telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan anak meskipun belum semua kebutuhan terpenuhi.
 2. Respon Peksos terhadap PKSAB. Peksos merespon positif PKSAB, singgungan langsung ke lapangan membuat Peksos mengerti betul permasalahan yang dihadapi oleh anak, sehingga peksos mendukung serta menjalankan dengan baik PKSAB sesuai kemampuannya.
 3. Respon LKSA terhadap PKSAB. Tidak berbeda dengan Peksos, Kepala LKSA menjabarkan bahwa dengan adanya PKSAB, anak balita yang mendapatkan bantuan memiliki progres ke arah yang jauh lebih baik
- e. Ketepatan
1. Penerima bantuan PKSAB adalah anak miskin dari keluarga miskin pula. Penerima bantuan PKSAB adalah

benar-benar anak miskin dari keluarga miskin pula. Sesuai kriteria adalah orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap.

2. Ketaatan penerima bantuan terhadap ketentuan penerimaan dana yang disalurkan langsung dari Kementerian Sosial ke dalam Rekening penerima bantuan. Dana yang didapatkan anak langsung diturunkan Kementerian Sosial ke dalam buku tabungan (rekening) anak. Peksos yang berkoordinasi dengan LKSA membelanjakan barang yang bersifat primer.

G.2 Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan PKSAB

- a. Bantuan Sosial/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar . Pemenuhan kebutuhan dasar anak merupakan elemen terpenting yaitu terpenuhinya gizi anak, anak sehat, serta tumbuh kembang anak tidak terganggu. Ini merupakan faktor pendukung dalam PKSAB
- b. Peningkatan Aksesibilitas terhadap Pelayanan Sosial Anak. Kepengurusan Akte merupakan suatu yang penting dikarenakan Akte merupakan identitas bagi anak. Faktor kemahalan dalam kepengurusan akte membuat Orang tua enggan mengurus. PKSAB memfasilitasi dalam kepengurusan Akte untuk anak.
- c. Penguatan Tanggung Jawab orang Tua/Keluarga dan Masyarakat. Komponen program ini yang menjadi faktor penghambat program, ditinjau dari banyak orang tua yang kurang faham pemantauan tumbuh kembang anak, tidak memahami arti penting pendidikan dini untuk anak, serta kesibukan orang tua bekerja mencari uang.
- d. Penguatan Kelembagaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Penguatan

kelembagaan LKSA tidak hanya untuk menambah jumlah anak balita yang mendapatkan kesejahteraan akan tetap peningkatan manajemen dalam pelaporan kegiatan program ke Kemensos.

Dengan adanya kesimpulan di atas maka adanya beberapa saran atau rekomendasi untuk peningkatan PKSAB di kota Semarang, antara lain :

- 1) Bimbingan dan Pemantapan terhadap Peksos serta LKSA yang diterjunkan di lapangan agar bisa lebih profesional sehingga ketika berada di lapangan bisa segera melaksanakan tugasnya.
- 2) Adanya tugas pokok yang jelas pada Pekerja Sosial agar memudahkan dalam pemahaman tugas di lapangan
- 3) Adanya sosialisasi yang bersifat top down untuk kabupaten / kota dengan PKSAB sehingga memudahkan koordinasi kegiatan PKSAB dari LKSA dan Peksos di lapangan.
- 4) Peran serta Dinas Sosial Kota Semarang seharusnya turut membantu dalam pelaksanaan program.